



**PELAKSANAAN PENUMBUHAN BUDI PEKERTI OLEH  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI SMP NEGERI 3 SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh  
Atmini  
NIM 3301412058

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*  
Tanggal : *26 September 2016*

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

*[Signature]*  
Prof. Dr. Marhan Rachman M.Sc.  
NIP 194806091976031001

Dosen Pembimbing II

*[Signature]*  
Moh. Aris Munandar S.Sos, MM  
NIP 197207242000031001

Menyetujui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

*[Signature]*  
Drs. Tijan M.Si.  
NIP 196211201987021001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Oktober 2016

Penguji I

Drs. Tijan M.Si.  
NIP 196211201987021001

Penguji II

Prof. Dr. Maman Rachman M.Sc.  
NIP 194806091976031001

Penguji III

Moh. Aris Munandar S.Sos, MM  
NIP 197207242000031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Saiful Mustofa, MA  
NIP 195603021988031001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil pekerjaan saya. Pendapat dan teori orang lain yang digunakan dalam karya ilmiah ini, saya rujuk berdasarkan kode etik ilmiah yang berlaku.

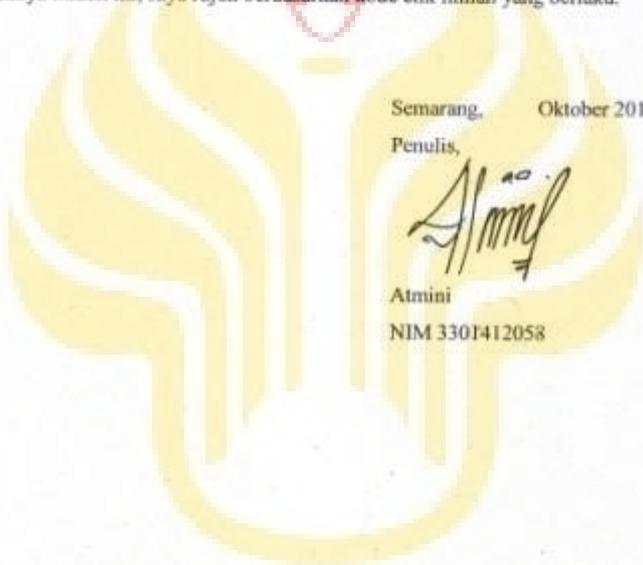
Semarang, Oktober 2016

Penulis,



Atmini

NIM 3301412058



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ❖ Manusia dengan budi pekerti luhur dimana pun berada akan menjadi pemenang untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- ❖ Proses tidak mengkhianati hasil. Oleh karena itu, tetaplah berusaha disertai do'a.
- ❖ Satu masa satu kesempatan.

### Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kehidupan yang luar biasa dan juga dipertemukan dengan orang-orang luar biasa sehingga menyadarkanku bahwa keberadaan-Mu benar-benar nyata adaNya.
2. Wanita tercantikku (Ibu) dan Laki-laki tersabarku (Bapak) atas semua perjuangan dan do'a yang tidak sebanding dengan perjuangan anakmu ini.
3. Nenekku (Mak Ni) yang setiap saat berdo'a untuk keselamatan dan kesuksesanku.
4. Dosen pembimbing Prof. Dr. Maman Rachman M.Sc. dan Moh. Aris Munandar S.Sos, MM, terimakasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada untuk selalu belajar dan belajar dimanapun berada.
5. Bapak Agusalim, Ibu Biyani, Ibu Pratini, Bapak Langgeng, Bapak Kukuh, Bapak Djoko, dan Staff Tata Usaha SMP Negeri 3 Semarang yang menerima dan bersedia membantu dalam menyelesaikan proses penelitian.
6. Teman-teman civitas akademika PPKn Unnes 2012 serta anak-anak kost Arimi yang tidak berhenti memberikan semangat dan dukungan.

## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

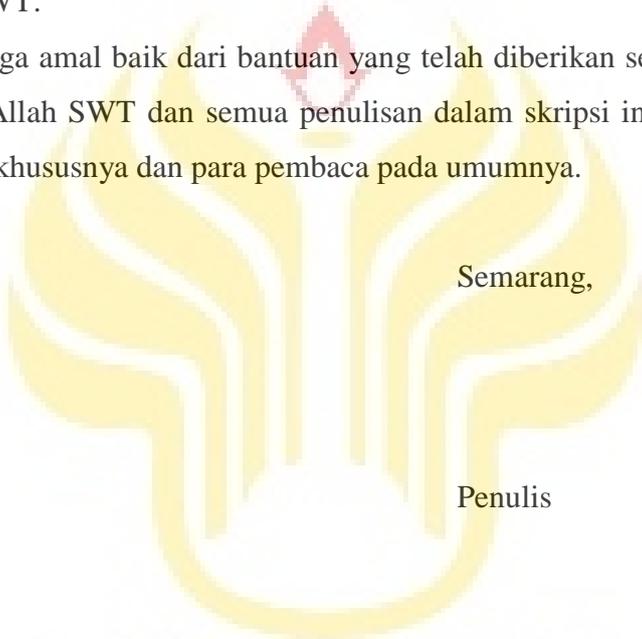
1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di perguruan tinggi.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengelolala akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengelola akademik ditingkat jurusan.
4. Prof. Dr. Maman Rachman M.Sc.Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan demi kelancaran tugas akhir ini.
5. Moh. Aris Munandar S.Sos, MM, Dosen Pembimbing II yang sudah sabar dan bersedia dikejar-kejar mahasiswanya setiap hari serta nasihatnya untuk selalu belajar dan belajar.
6. Drs. Tijan, M.Si, Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar SMP Negeri 3 Semarang yang sudah menerima saya dengan baik selama penelitian.
8. Nova Aulia Faza, Atik Afriyani, dan Nurul Faizah,dan Isti Nur Khalimah terimakasih sudah setia menemani penelitian saya di SMP Negeri 3 Semarang.
9. Teman-teman PPL SMP Negeri 3 Semarang dan KKN Ceria Unnes 2015, terimakasih sudah berbagi pengalaman dan kebaikannya.

10. Teman-teman seperjuangan PPKn Unnes Angkatan 2012 yang telah berbagi ilmu dalam setiap *moments* belajar kita selama empat tahun ini
11. Keluarga keduaku di kos Arimi, terimakasih sudah menerimaku dengan senyum kalian.
12. Pihak-pihak yang belum saya sebutkan dalam halaman prakata ini dan selalu saya ingat dalam pikiran dan hati saya, terimakasih atas dukungan dan do'anya, semoga amal baik kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semoga amal baik dari bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan semua penulisan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Oktober 2016

Penulis



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## SARI

**Atmini. 2016.***Pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Prof. Maman Rachman, M.Si., dan Mohammad Aris Munandar, S.Sos, MM. 102halaman.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Penumbuhan, Budi Pekerti, Pendidik, Tenaga Kependidikan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti oleh Kemdikbud dan mewajibkan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk melaksanakannya mulai tahun pelajaran 2015/2016. Fakta yang terjadi di lapangan adalah masih banyak sekolah yang mengabaikan pelaksanaan penumbuhan budi pekerti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang. Ada sekolah yang sudah melaksanakan dan ada yang belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Fokus penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang. Sumber data penelitian ini adalah informan, dokumentasi, dan peristiwa. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif melalui tahapan reduksi, sajian data, kemudian sampai pada penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan cara mengintegrasikan 20 (dua puluh) karakter SMP Negeri 3 Semarang ke dalam 30 (tiga puluh) kegiatan dari program pendidikan karakter yang meliputi kegiatan wajib, pembiasaan umum dan periodik; (2) pelaksanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang sesuai dengan program yang sudah direncanakan, yaitu melaksanakan 30 (tiga puluh) kegiatan dari program pendidikan karakter; dan (3) evaluasi penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 3 Semarang dilaksanakan tidak hanya oleh pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, tetapi juga melibatkan pihak luar yang terkait dengan cara memantau dan mengevaluasi yang dilanjutkan memberikan arahan.

Saran dari penulis adalah: (1) pendidik dan tenaga kependidikan mewujudkan kegiatan menggunakan bahasa Jawa selama KBM pada hari Kamis sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tidak hanya oleh guru dan karyawan, tetapi juga oleh siswa-siswi; (2) sekolah memberikan waktu lebih kepada warga sekolah dalam menumbuhkan sikap dan perilaku positif; dan (3) pemerintah melaksanakan wewenangya dalam memberikan evaluasi penumbuhan budi pekerti di sekolah.

## ABSTRACT

**Atmini. 2016.** Implementation of Growth Budi Pekerti Character by Teachers and Education Personnel in SMP Negeri 3 Semarang. Essay. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Prof. Maman Rachman, M.Sc., and Mohammad Aris in, Sos, MM. 102 pages.

**Keywords: Implementation, Growth, Budi Pekerti Character, Educator, Education Personnel**

This research is motivated by the issuance Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti by Kemdikbud and require that all schools in Indonesia to implement them start the school year 2015/2016. The fact that happened on the field is still a lot of schools that ignore the implementation of the cultivation of budi pekerti character. Therefore, researchers interested in studying the implementation of the cultivation of budi pekerti character by teachers and education staff at SMP Negeri 3 Semarang. There are schools that are already implementing and nothing yet. This study aims to determine: planning, implementation, and evaluation of growth of budi pekerti character by teachers and education staff at SMP Negeri 3 Semarang.

The approach that used is qualitative. The focus of this research is the planning, implementation, and evaluation of growth of budi pekerti character by teachers and education staff at SMP Negeri 3 Semarang. The data source of this research is that the informant, documentation, and events. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. Testing the validity of the data using triangulation techniques. The data obtained and analyzed by interactive analysis through the stages of reduction, data presentation, and then come to the conclusion data.

The results showed that (1) planning the growth of budi pekerti character by teachers and by integrating the 20 (twenty) characters SMP Negeri 3 Semarang to within 30 (thirty) activities of character education programs that include mandatory activities, habituation general and periodic ; (2) the implementation of the cultivation of character by teachers and education staff at SMP Negeri 3 Semarang in accordance with the planned program, of carrying out the 30 (thirty) activities of character education programs; and (3) evaluation of character growth in SMP Negeri 3 Semarang implemented not only by teachers and schools, but also involve outside parties related to how to monitor and evaluate continuing to provide direction.

Advice of the author are: (1) teachers and realize the activities using the Java language during a lecture on Thursday in accordance with their planned activities not only by teachers and employees, but also by students; (2) schools give more time to the school community in foster positive attitudes and behavior; and (3) the government exercise its authority in delivering growth evaluation of budi pekerti character in school.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR</b>	
A. Deskripsi Teoritis .....	14
B. Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Latar Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Sumber Data Penelitian	
1. Informan .....	37
2. Dokumentasi.....	38
3. Peristiwa .....	38
D. Alat dan Teknik Penelitian	
1. Teknik Observasi dan Lembar Observasi .....	39
2. Teknik Wanacara dan Pedoman Wawancara .....	39
3. Teknik Dokumentasi dan Daftar Cek.....	40
E. KeabsahanData.....	40
F. Teknik Analisis Data	
1. Reduksi Data .....	42
2. <i>Display Data</i> .....	43
3. <i>Conclusion Drawing/ Verivication</i> .....	44

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Kondisi Geografis Lokasi..... 45
2. Sarana dan Prasarana Sekolah..... 46
3. Sistem KBM dan Sebaran Guru, Siswa, serta Tenaga Administrasi Sekolah  
..... 51
4. Visi dan Misi Sekolah ..... 54

### **B. Hasil Penelitian**

1. Perencanaan Penumbuhan Budi Pekerti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang..... 56
2. Pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang..... 63
3. Evaluasi Penumbuhan Budi Pekerti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang..... 84

### **C. Pembahasan**

1. Program Pendidikan Karakter sebagai Model Penumbuhan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Semarang ..... 87
2. Kegiatan Unggulan Penumbuhan Budi Pekerti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang..... 91
3. Pelibatan Pihak Luar yang Terkait Penumbuhan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Semarang ..... 94

## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan..... 97
- B. Saran..... 98

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 100

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Bangunan Fisik dan Luas Ruangan .....	45
Tabel 4.2 Daftar Bangunan Lainnya .....	46
Tabel 4.3 Sebaran Siswa Setiap Kelas Tahun Pelajaran 2015/2016 SMP Negeri 3 Semarang .....	51
Tabel 4.4 Jenjang Pendidikan dan Status Guru.....	52
Tabel 4.4 Jenjang Pendidikan dan Status Pegawai Administrasi.....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi TU SMP Negeri 3 Semarang .....	53
Gambar 4.2 Siswa dan Guru Sholat Dzuhur Berjamaah.....	64
Gambar 4.3 Tadarus dan membaca Asmaul Husna Bersama .....	65
Gambar 4.4 Berdoa Awal dan Akhir KBM .....	65
Gambar 4.5 Pesantren Ramadhan .....	66
Gambar 4.6 Upacara Setiap Hari Senin .....	67
Gambar 4.7 Hormat kepada Bendera dan menyanyikan Lagu Kebangsaan sebelum Memulai KBM Ketika di Luar Kelas .....	67
Gambar 4.8 Menyanyikan Lagu Wajib Nasional dan Lagu daerah Sebelum dan Sesudah KBM .....	68
Gambar 4.9 Upacara Penyambutan Siswa Baru Ketika MOPDB .....	68
Gambar 4.10 Lomba Mendongeng Untuk Penanaman Karakter .....	69
Gambar 4.11 Berpakaian Baju Adat Indonesia Selama KBM Untuk Memperingati Hari Kartini .....	69
Gambar 4.12 Bersalaman dengan Guru .....	70
Gambar 4.13 Gerakan Disiplin Siswa.....	70
Gambar 4.14 Bersalaman dengan Guru Sebelum Masuk Kelas .....	71
Gambar 4.15 Acara Halal Bihalal Sesama Siswa .....	72
Gambar 4.16 Budaya Sekolah 5S.....	72
Gambar 4.17 Acara Halal Bihalal Sesama Siswa dan Guru .....	73
Gambar 4.18 Kerjasama Tim Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal.....	74
Gambar 4.19 Kemandirian melalui Ekstrakurikuler Pramuka.....	74
Gambar 4.20 Kegiatan Kepedulian Sosial di Panti Asuhan.....	75
Gambar 4.21 Kunjungan ke Panti Asuhan .....	75
Gambar 4.22 Tali Asih.....	76
Gambar 4.23 Kerja Bakti .....	76
Gambar 4.24 Daur Ulang Sampah .....	77
Gambar 4.25 Tempat Sampah untuk Tiga Jenis Sampah .....	77
Gambar 4.26 Budaya Tertib Antri .....	78
Gambar 4.27 Siswa Melakukan Pemeriksaan Kesehatan .....	78
Gambar 4.28 Pemberian <i>Reward</i> Kepada Siswa Berprestasi .....	79
Gambar 4.29 Pengembangan Bakat Melalui Ekstrakurikuler.....	80
Gambar 4.30 Pengembangan Bakat dengan Mengikuti Lomba Tari.....	80
Gambar 4.31 Siswa wajib mengunjungi dan membaca di Perpustakaan selama sholat dzuhur berjamaah berlangsung .....	81
Gambar 4.32 Kegiatan MOPDB 2015/2016: Pemberian Materi Bahaya Narkoba Oleh Polri .....	82
Gambar 4.33 Kegiatan MOPDB 2015/2016: Pemberian Materi Tentang Menjaga Kebersihan Lingkungan Oleh PKK.....	82
Gambar 4.34 Kerja Sama dengan Ditlantas Polda Jateng.....	83
Gambar 4.35 Pengamanan lalu Lintas di Depan sekolah Oleh Satpam Sekolah dibantu Polisi .....	84
Gambar 4.36 Penyuluham Hukum Oleh KemhumHAM Jateng.....	84

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pembudayaan Penumbuhan Budi Pekerti.....	24
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	31
Bagan 3.1 Alur Pengolahan Data .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	104
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari SMP Negeri 3 Semarang....	105
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	106
Lampiran 4 Reduksi Data Penelitian.....	159
Lampiran 5 Program <i>Best Practice Nationalism</i> .....	185
Lampiran 6 Program Pendidikan Karakter .....	187
Lampiran 7 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti .....	189
Lampiran 8 Program Tahunan Wakasek Kesiswaan .....	199
Lampiran 9 Program Tahunan Wakasek Akademik .....	203
Lampiran 10 Laporan Realisasi Kegiatan Perpustakaan Tahun Pelajaran 2015/2016.....	207
Lampiran 11 RPP Mapel Pkn, TIK, Penjas Orkes, dan IPS .....	208
Lampiran 12 Daftar Informan .....	237
Lampiran 13 Gambar Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	238



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan dunia saat ini sangat pesat dengan ditandai adanya modernisasi disemua lini kehidupan, hal ini berbanding lurus dengan semakin tingginya persaingan antar individu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan masing-masing. Persaingan bisa menjadi positif, jika dijadikan ajang untuk meningkatkan potensi diri. Namun, persaingan bisa menjadi sesuatu hal yang negatif jika membuat individu melupakan tata nilai yang seharusnya tetap dijaga untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan.

Dasawarsa ini, warga negara Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan wahana untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri setiap generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam Ayat (1) Pasal 31 UUD 1945. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat (Zuriah, 2011: 7).

Tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lebih lanjut pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Ayat (2) Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Melihat tujuan pendidikan nasional tersebut, maka paradigma pendidikan Indonesia memang sudah bergeser jauh dari yang fokus utama pengembangan segi IQ (kecerdasan intelektual), menambah fokus utamanya di ranah pengembangan EQ (kecerdasan emosional) dan SQ (kecerdasan spiritual). Namun, pergeseran paradigma tersebut tidak dapat mengubah paham masyarakat Indonesia yang fokus utama dalam memandang pendidikan lebih kepada mengejar kecerdasan intelektual semata (Sumarno, 2007: 21).

Bloom dalam Ali (2009: 132) membagi tujuan pendidikan menjadi tiga wilayah, yaitu: kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap), yang dapat diajarkan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Manusia yang pintar dalam hal pengetahuan tidaklah benar tanpa dibarengi dengan akhlak atau budi pekerti. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang memiliki kesempatan paling besar selain keluarga dalam

membentuk karakter generasi muda bangsa Indonesia. Karena sebagian besar waktu generasi muda Indonesia dihabiskan di dalam lingkungan sekolah.

Garin Nugroho dalam Muslich (2013: 2) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kehilangan rohnya dan nilai-nilai luhur kemanusiaan lantaran tunduk terhadap pasar bukan pencerahan terhadap peserta didik. Praktiknya di sekolah terlihat ketika siswa dituntut untuk memenuhi angka-angka ketuntasan minimal nilai lulusan setiap mata pelajaran dalam setiap ujian yang dilakukan. Belum lagi adanya jam tambahan oleh sekolah ketika siswa tingkat akhir yang akan mengikuti ujian nasional, sekolah mengadakan jam tambahan di luar jam KBM. Belum lagi siswa yang mengikuti les-les mata pelajaran di luar sekolah. Semua itu merupakan usaha untuk mengejar nilai kognitif yang jauh dari penanaman sikap, nilai, dan budaya. Orang tua sangat bangga bila anaknya memiliki rerata nilai tinggi (Suwarna, 2007: 20).

Thomas Lickona dalam Muslich, (2013: 35) mengungkapkan bahwa sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka berarti sebuah bangsa sedang dalam jurang kehancuran. Tanda-tanda-tanda yang dimaksud adalah (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga

negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga.

Survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun 2014, diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia beresiko terpapar narkoba (Sumber: [bnn.go.id](http://bnn.go.id)). Tahun yang sama, BNN melaporkan rerata usia pertama melakukan hubungan seks yaitu 18 tahun dengan usia termuda 8 sampai 42 tahun, dimana partner hubungan seks sebulan terakhir adalah pacar (49%), teman (26%), dan pekerja seks (12%) serta laporan mengenai adanya barter seks dengan narkoba antara pelaku dengan bandar di beberapa kota besar seperti Lampung (1,2%), DKI (1,1%), Sulsel (2,0%), dan Sulut (1,0%). Selain itu, Maret 2015 *LSM Plan International* dan *International Center for Reserach on Women (ICRW)* merilis hasil riset yang menunjukkan fakta, terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70% (Sumber: [m.liputan6.com/news](http://m.liputan6.com/news)).

Suparno (2002: 11) menyatakan bahwa pendidikan Indonesia sebagai pendidikan yang kurang utuh. Sebagian besar waktu yang digunakan siswa Indonesia di sekolah dengan kegiatan pembelajaran di kelas (pengetahuan) tidak menjamin terbentuknya perilaku baik siswa. Nyatanya segi non pengetahuan kurang mendapatkan perhatian sehingga yang dihasilkan adalah siswa yang sungguh pandai dalam hal pengetahuan tetapi tidak bermoral atau

tidak seimbang dalam segi kehidupan yang lain. Melihat permasalahan di atas, maka perlu adanya perbaikan pola pendidikan Indonesia.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Mendikbud mewajibkan kepada setiap sekolah untuk melaksanakan Penumbuhan budi pekerti mulai tahun pelajaran 2015/2016. Dasar pelaksanaan Permendikbud tersebut adalah sebagai berikut.

“Secara teoritis setiap sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenaga kependidikan, pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah, pendidikan karakter seharusnya menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau orang tua. Namun, yang terjadi adalah masih terabaikannya implementasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila yang masih terbatas pada pemahaman nilai dalam tataran konseptual, belum sampai mewujudkan menjadi nilai aktual dengan cara yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat”.

Masih terabaikannya nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila yang hanya sebatas pada pemahaman dan belum terwujud dalam perilaku atau praktiknya di lingkungan sekolah adalah *point* penting yang menggambarkan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Zuriah (2008: 38) menyatakan bahwa budi pekerti adalah nilai-nilai hidup manusia yang sungguh-sungguh dilaksanakan bukan karena sekedar kebiasaan, tetapi berdasar pemahaman dan kesadaran diri untuk menjadi baik. Penumbuhan budi pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan

pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah (Pasal 1 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015). Tugas sekolah ialah menciptakan iklim sekolah yang baik agar semua perangkat sekolah turut berbudi pekerti. Pelaksanaan penumbuhan budi pekerti di lingkungan sekolah terdiri dari tujuh aspek kegiatan yang harus dilaksanakan seperti yang ada dalam Lampiran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015, meliputi: (1) internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual; (2) penanaman nilai kebangsaan dan kebhinekaan; (3) interaksi positif dengan sesama siswa; (4) interaksi positif dengan guru dan orang tua; (5) penumbuhan potensi unik dan utuh setiap anak; (6) pemeliharaan lingkungan sekolah; (7) dan pelibatan orang tua dan masyarakat.

Sesuai dengan instruksi Mendikbud, yang mewajibkan pelaksanaan penumbuhan budi pekerti mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dibutuhkan kerja sama yang baik dari pihak pengelola suatu satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Mereka yang berprofesi sebagai pendidik dalam Ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Ada beberapa pendidik yang memiliki tugas tambahan selain tugas wajib yang sudah disebutkan. Tugas tambahan yang dimaksud adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/madrasah, kepala laboratorium/bengkel sekolah/madrasah, atau ketua program keahlian/program studi (Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya). Tenaga kependidikan menurut Pasal 1 dan 39 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki beberapa kewajiban, yaitu: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berhubungan dengan program pemerintah yang mewajibkan setiap sekolah untuk melaksanakan penumbuhan budi pekerti, SMP Negeri 3 Semarang menunjukkan dengan menjaga konsistensi sekolah dalam menjalankan visi sekolah yaitu *Berbudi Luhur, Berpengetahuan Tinggi, dan*

*Berwawasan Luas*, yang kemudian dijadikan pedoman dalam membuat program-program sekolah oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai wujud pelaksanaan penumbuhan budi pekerti. Salah satunya adalah program pendidikan karakter dan beberapa kegiatan *best practice nationalism*. Program pendidikan karakter terdiri dari enam pilar karakter bangsa, yaitu: pilar religi, kedisiplinan, kejujuran, ekspresi diri, berpikir kritis, dan empati. Berdasar wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) bidang Kesiswaan (Ibu Pratini, S.Pd) yang juga selaku penanggungjawab program pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Semarang, ada sekitar 30 (tiga puluh) kegiatan dan 20 nilai karakter di dalamnya sebagai pelaksanaan dari program pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Semarang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk membentuk karakter siswa SMP Negeri 3 Semarang.

Penumbuhan budi pekerti merupakan program baru pemerintah yang mewajibkan kepada semua sekolah untuk melaksanakannya mulai tahun pelajaran 2015/2016. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang melalaikan atau tidak melaksanakan penumbuhan budi pekerti. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana penumbuhan budi pekerti dilaksanakan. Apakah sekolah itu hanya sekedar melaksanakan tanpa perencanaan yang matang atau dengan sungguh-sungguh melaksanakannya dengan membuat perencanaan sampai pelaksanaan yang matang. Hal ini perlu dilakukan karena pembiasaan sikap dan berperilaku positif dari usia muda sangatlah penting dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang ketika sudah dewasa nantinya.

Berdasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang?
3. Bagaimana evaluasi penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar rumusan masalah, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui perencanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang.
2. Mengetahui pelaksanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang.
3. Mengetahui evaluasi penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian dapat menambah teori dan menumbuhkan khasanah pengetahuan tentang penumbuhan budi pekerti. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai penumbuhan budi pekerti.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Sekolah**

Penelitian ini dapat dijadikan analisis bagi sekolah dalam melaksanakan penumbuhan budi pekerti warga sekolah, dan dapat menjadi refleksi bagi sekolah dalam membuat program-program sekolah sebagai upaya menumbuhkan perilaku positif warga sekolah.

#### **b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti di sekolah pada setiap program sekolah.

#### **c. Pemerintah**

Penelitian dapat menjadi analisis keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan penumbuhan budi pekerti di setiap sekolah khususnya sekolah-sekolah di Kota Semarang serta membina

kerjasama dan hubungan yang baik dengan setiap sekolah khususnya di Kota Semarang untuk bersama menumbuhkan budi pekerti generasi muda dalam bidang pendidikan.

## **E. Batasan Istilah**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 946) berasal dari kata rencana yang berarti rancangan (rangka sesuatu yang akan dikerjakan), sedangkan perencanaan berarti proses, cara, perbuatan merencanakan (merancang). Perencanaan dalam penelitian ini adalah perencanaan penumbuhan budi pekerti yang sudah dirancang oleh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Semarang.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 627) berasal dari kata laksana yang berarti tanda yang baik; sifat; laku; perbuatan; sedangkan pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 3 Semarang dilaksanakan.

### **3. Evaluasi**

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 310) berarti penilaian. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan

standar (Permen Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan). Evaluasi dalam penelitian ini adalah membandingkan perencanaan penumbuhan budi pekerti yang sudah dirancang oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang dengan pelaksanaannya di lapangan dan hasil yang didapatkan.

#### **4. Penumbuhan**

Penumbuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1220) berasal dari kata tumbuh, berarti timbul (hidup) dan bertambah besar dan sempurna, sedangkan penumbuhan artinya proses cara perbuatan menumbuhkan. Penumbuhan dalam penelitian ini adalah cara pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Semarang menumbuhkan budi pekerti warga sekolah.

#### **5. Budi Pekerti**

Budi pekerti menurut Yatmana dalam Endraswara (2006: 1), berasal dari kata buddh, yaitu kata kerja yang berarti sadar, bangun, bangkit (kejiwaan) sedangkan pekerti akar kata yang berarti bekerja, berkarya, berlaku, bertindak (keragaan). Budi pekerti dalam penelitian ini adalah realisasi berupa tindakan dari hasil olah pikiran dan hati.

#### **6. Pendidik**

Pendidik dalam Ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik selain menjalankan tugas wajibnya sebagai guru juga ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/madrasah, kepala laboratorium/bengkel sekolah/madrasah, atau ketua program keahlian/program studi (Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya). Pendidik dalam penelitian ini adalah guru, dan yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah.

## **7. Tenaga Kependidikan**

Standar tenaga administrasi sekolah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah terdiri dari kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Pelaksana urusan terdiri dari pelaksana urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, serta kurikulum. Sedangkan petugas layanan khusus terdiri dari penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Tenaga kependidikan dalam penelitian ini adalah pustakawan dan tenaga administrasi sebagai pengelola satuan pendidikan yang terdiri dari kepala tenaga administrasi, tenaga administrasi urusan kesiswaan, bendahara, dan tenaga administrasi pelayanan khusus, yaitu: petugas kebersihan dan keamanan (satpam sekolah).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teoritis**

##### **1. Konsep Penumbuhan Budi Pekerti**

###### **a. Pengertian Budi Pekerti**

Poerwadarminto dalam Endraswara (2006: 1) menyatakan, secara etimologi budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Kata budi berarti nalar, pikiran, watak. Sedangkan pekerti berarti pengaweyan, watak, tabiat, dan akhlak. Jadi kata budi pekerti berarti tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Sedangkan dalam bahasa sansekerta oleh Yatmana dalam Endraswara (2006: 1), kata budi berasal dari akar kata buddh, yaitu kata kerja yang berarti sadar, bangun, bangkit (kejiwaan). Budi adalah penyadar, pembangun, dan pembangkit. Budi adalah ide-ide. Pekerti akar kata yang berarti bekerja, berkarya, berlaku, bertindak (keragaan). Pekerti adalah pekerjaan, karya, laku. Pekerti adalah tindakan-tindakan. Meskipun budi dan pekerti dapat dibedakan, namun tidak mungkin dipisahkan. Sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai realisasi tindakan dari hasil olah pikiran dan hati.

Secara operasional, budi pekerti dapat dimaknai sebagai perilaku yang tercermin dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap dan perasaan, keinginan dan hasil karya (Gunawan, 2014: 13). Budi pekerti diartikan sebagai sikap atau perilaku sehari-hari, baik

individu, keluarga, maupun masyarakat bangsa yang mengandung nilai-nilai berlaku dan dianut dalam bentuk jati diri, nilai persatuan dan kesatuan, integritas dan kesinambungan masa depan dalam suatu sistem nilai moral, dan yang menjadi pedoman perilaku manusia (Indonesia) untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan sumber pada falsafah Pancasila dan diilhami dengan ajaran agama serta budaya bangsa Indonesia (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, 1995).

Pengertian budi pekerti mengacu pada pengertian dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung beberapa pengertian antara lain: (a) adat istiadat, (b) sopan santun, dan (c) perilaku. Ivonna Indah, dkk (2003: 15) mengartikan budi pekerti sebagai nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata yang memuat proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. Namun pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku (Zuriah, 2011: 17). Sedyawati dalam Suparno (2002: 27) mengartikan budi pekerti sebagai moralitas yang mengandung pengertian antara lain adat istiadat, sopan, santun, dan perilaku. Sikap dan perilaku itu mengandung lima jangkauan, yaitu: (1) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan; (2) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan diri sendiri; (3) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan keluarga; (3) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan masyarakat dan bangsa; dan

(4) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Dengan demikian, dapat dinyatakan, budi pekerti itu merupakan sikap dan perilaku (tingkah laku, solah bawa, muna muni) yang dilandasi oleh kegiatan berpikir atau olah batin akumulasi dari cipta-rasa-karsa yang diaktualisasikan ke dalam sikap, kata-kata, dan tingkah laku seseorang. (Endraswara, 2006: 2).

Supriyoko dalam Endraswara (2006: 2) menjelaskan budi pekerti menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro yaitu perilaku sosial seseorang yang didasarkan pada kematangan jiwanya sehingga melahirkan budi pekerti luhur yang berarti, sikap dan perilaku seseorang yang di samping didasarkan kematangan jiwa (internal) juga diselaraskan dengan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat sekitarnya (eksternal). Artinya, orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak akan menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas (Endraswara, 2006: 3).

**b. Pengertian Penumbuhan Budi Pekerti**

Mendikbud menjelaskan, penumbuhan budi pekerti adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan non kurikuler di sekolah yang bertujuan menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti anak-anak bangsa. Mendikbud mengungkapkan, pada intinya budi pekerti perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan bukan sebagai pengetahuan saja. Itu artinya, sesuatu hal yang dikerjakan secara rutin atau terus menerus

dan apabila budi pekerti itu tumbuh sebagai kebiasaan maka akan menjadi karakter yang selanjutnya menjadi budaya (Sumber: Kemdikbud.go.id).

Pasal 1 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti dijelaskan sebagai berikut.

“Penumbuhan budi pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah. Masa orientasi peserta didik baru yang selanjutnya disebut MOPDB adalah serangkaian kegiatan pertama masuk sekolah pada setiap awal tahun pelajaran baru yang berlangsung paling lama 5 (lima) hari. Pembiasaan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter positif. Sedangkan kelulusan adalah berakhirnya proses pembelajaran siswa pada satuan pendidikan.”

Jadi, penumbuhan budi pekerti merupakan serangkaian kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah dimulai dari MOPDB, pembiasaan positif ketika di lingkungan sekolah sampai kelulusan. Pasal 2 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti disebutkan tujuan dari penumbuhan budi pekerti, yaitu sebagai berikut.

“Penumbuhan budi pekerti bertujuan untuk: (a) menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; (c) menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang

melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau (d) menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.”

Serangkaian kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif yang dimulai dari MOPDB sampai kelulusan tersebut terdiri dari tujuh aspek kegiatan penumbuhan budi pekerti yang terdapat pada Lampiran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015, meliputi: (1) internalisasi sikap moral dan spiritual, yaitu mampu menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar; (2) keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk meningkatkan persatuan bangsa yaitu mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama bahasa Indonesia; (3) interaksi positif antara siswa dan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah, yaitu mampu dan mau menghormati guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah, dan orangtua; (4) interaksi positif antar siswa yaitu kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas, dan kakak kelas; (5) memelihara lingkungan sekolah yaitu melakukan gotong-royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan

lingkungan sekolah; (6) penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan yaitu mendorong peserta didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri; dan (7) penguatan unsur orang tua dan unsur masyarakat yang terkait, yaitu melibatkan peran aktif orangtua dan unsur masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.

**c. Metode dan Cara Pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti**

Metode penumbuhan budi pekerti seperti yang dijelaskan pada lembaran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti untuk jenjang sekolah menengah pertama dilakukan dengan kemandirian peserta didik membiasakan keteraturan dan pengulangan, yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, intra kurikuler, sampai dengan lulus.

Sedangkan cara pelaksanaan penumbuhan budi pekerti bersifat kontekstual, yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai muatan lokal daerah pada peserta didik sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah memasukkan unsur-unsur budaya lokal dalam suatu kegiatan penumbuhan budi pekerti dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

#### **d. Tujuh Aspek Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti**

Lampiran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti disebutkan jenis-jenis kegiatan pelaksanaan penumbuhan budi pekerti yang dimulai dari MOPDB sampai kelulusan yang terdiri dari tujuh aspek kegiatan penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan wajib, periodik, dan umum di lingkungan sekolah, yaitu sebagai berikut.

##### 1) Internalisasi sikap moral dan spiritual

Mampu menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar. Kegiatan wajibnya adalah guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru.

##### 2) Keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinnekaan untuk merekatkan persatuan bangsa

Mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama bahasa Indonesia.

Kegiatan wajibnya adalah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang

sesuai dengan ketentuan sekolah, melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus yang setara SMP/SMA/SMK dengan peserta didik bertugas sebagai komandan dan petugas upacara serta kepala sekolah/wakil bertindak sebagai inspektur upacara, sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air, dan sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan satu lagu daerah (lagu-lagu daerah seluruh Nusantara).

- 3) Interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah

Mampu dan mau menghormati guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah, dan orangtua. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, peserta didik dan orangtua. Interaksi positif antara tiga pihak tersebut dibutuhkan untuk membangun persepsi positif, saling pengertian dan saling dukung demi terwujudnya pendidikan yang efektif.

Kegiatan wajibnya adalah sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa pada setiap tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan: (a) visi; (b) aturan; (c) materi; dan (d) rencana

capaian belajar siswa agar orangtua turut mendukung keempat poin tersebut.

#### 4) Interaksi sosial positif antar peserta didik

Kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas, dan kakak kelas. Peserta didik hadir di sekolah bukan hanya belajar akademik semata, tapi juga belajar bersosialisasi. Interaksi positif antar peserta didik akan mewujudkan pembelajaran dari rekan (peer learning) sekaligus membantu siswa untuk belajar bersosialisasi.

Kegiatan wajibnya adalah membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah dan/atau rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau orangtua.

#### 5) Memelihara lingkungan sekolah

Melakukan gotong-royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah akan mempengaruhi warga sekolah baik dari aspek fisik, emosi, maupun kesehatannya. Karena itu penting bagi warga sekolah untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah serta diri.

Kegiatan wajibnya adalah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan siswa.

6) Penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan

Mendorong peserta didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri. Setiap siswa mempunyai potensi yang beragam. Sekolah hendaknya memfasilitasi secara optimal agar siswa bias menemukan dan mengembangkan potensinya.

Kegiatan wajibnya adalah menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari) dan seluruh warga sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa) memanfaatkan waktu sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik seperti senam kesegaran jasmani, dilaksanakan secara berkala dan rutin, sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu.

7) Penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat yang terkait

Melibatkan peran aktif orangtua dan unsur masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, sekolah hendaknya melibatkan orangtua dan masyarakat dalam proses belajar. Keterlibatan ini diharapkan akan berbuah dukungan dalam berbagai bentuk dari orangtua dan masyarakat.

Kegiatan wajibnya adalah mengadakan pameran karya siswa pada setiap akhir tahun ajaran dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi apresiasi pada siswa.

#### e. Alur Pembudayaan Penumbuhan Budi Pekerti di Sekolah

Budi pekerti perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan bukan sebagai pengetahuan saja, artinya sesuatu hal yang dikerjakan secara rutin atau terus menerus dan apabila budi pekerti itu tumbuh sebagai kebiasaan maka akan menjadi karakter yang selanjutnya menjadi budaya (Sumber: kemdikbud.go.id). Berikut bagan alur pembudayaan penumbuhan budi pekerti pada siswa.



Bagan 2.1 Alur Pembudayaan Penumbuhan Budi Pekerti  
Sumber: kemdikbud.go.id

## 2. Evaluasi penumbuhan budi pekerti

Pemantauan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti tidak hanya dilakukan oleh sekolah tetapi juga elemen masyarakat dan

pemerintah khususnya pemerintah daerah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) (3) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti berikut ini.

“Pemantauan dan evaluasi kegiatan MOPDB dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiasaan serta interaksi dan komunikasi di sekolah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pemantauan dan evaluasi kegiatan saat kelulusan dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Artinya pemerintah perlu membangun kerja sama atau hubungan yang baik dengan sekolah agar pelaksanaan penumbuhan budi pekerti benar-benar dilaksanakan oleh sekolah dan dengan adanya dukungan dari pemerintah sekolah memiliki motivasi untuk melaksanakan budi pekerti dengan benar.

### **3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **a. Pendidik**

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003). Mereka yang berprofesi sebagai pendidik memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,

kreatif, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pendidik selain memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, juga memiliki tugas tambahan. Guru dengan tugas tambahan adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/madrasah, kepala laboratorium/bengkel sekolah/madrasah, atau ketua program keahlian/program studi (Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya).

Sebagaimana dikemukakan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah bertugas:

- 1) menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
- 2) merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
- 3) membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;

- 4) bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;
- 5) melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penye-lenggara sekolah/madrasah;
- 6) berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- 7) menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- 8) menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- 9) bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- 10) melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;
- 11) meningkatkan mutu pendidikan;
- 12) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

- 13) memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;
- 14) membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- 15) menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, se-hat, efisien, dan efektif;
- 16) menjalin kerja sama dengan orang tua pesertadidik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat; dan
- 17) memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh guru yang mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum/akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana prasarana. Kriteria wakil-wakil kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, adalah sebagai berikut.

1) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum/akademik, memiliki kriteria:

- a. mengelola dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal;
- b. memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran;
- c. menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
- d. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan
- e. menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

2) Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, memiliki kriteria:

- a. mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya secara optimal sesuai minat dan bakat masing-masing;
- b. mengelola layanan-layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah;
- c. melaksanakan bimbingan kegiatan-kegiatan kesiswaan; dan
- d. menegakkan disiplin dan tata tertib siswa.

3) Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, memiliki kriteria:

- a. mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah/madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran;
- b. mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan; dan
- c. mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.
- d. Wakil kepala sekolah bidang Humas, memiliki kriteria:
- e. membangun jejaring kerjasama dengan pihak luar;
- f. mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah; dan
- g. mempublikasikan kebijakan, program sekolah dan prestasi sekolah pada pihak diluar sekolah.

#### **b. Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Ayat (1) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Standar tenaga administrasi sekolah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah terdiri dari kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Pelaksanan urusan terdiri dari pelaksana urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, serta kurikulum. Sedangkan petugas layanan khusus terdiri dari penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Masing-masing tenaga administrasi sekolah harus memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu: kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.

## **B. Kerangka Berpikir**

Secara teoritis setiap sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenaga kependidikan, pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah, pendidikan karakter seharusnya menjadi gerakan bersama

yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau orang tua.

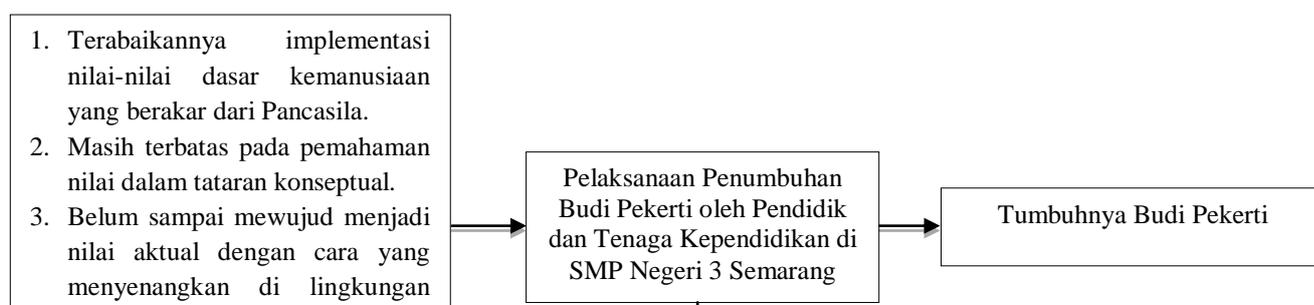
Ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Namun, yang terjadi adalah masih terabaikannya implementasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila yang masih terbatas pada pemahaman nilai dalam tataran konseptual, belum sampai mewujudkan menjadi nilai aktual dengan cara yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Kemendikbud, 2015).

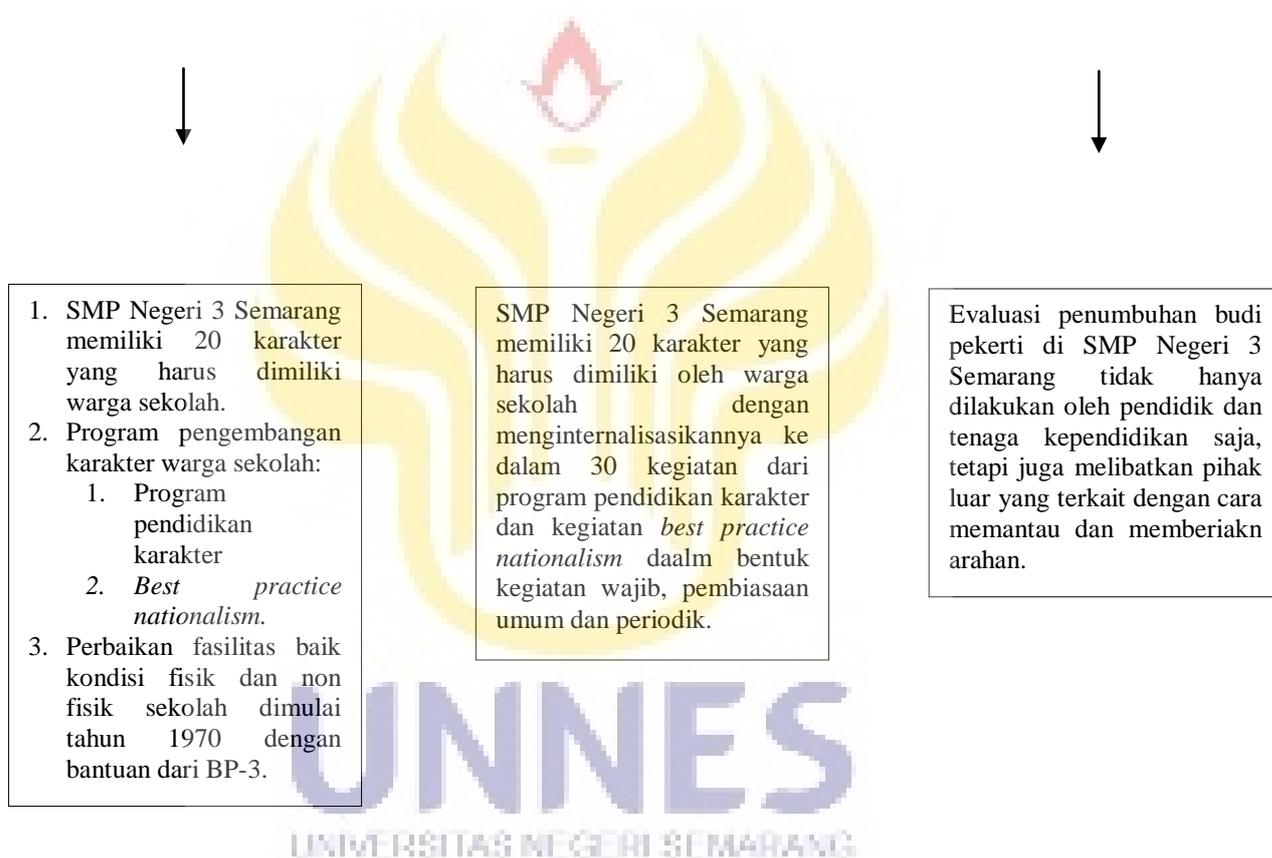
Keadaan di atas mengundang keinginan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah sampai pendidik untuk mencari solusi. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Setiap sekolah diwajibkan melaksanakan penumbuhan budi pekerti mulai tahun pelajaran 2015/2016. Penumbuhan budi pekerti atau yang biasa disebut PBP merupakan pembiasaan berperilaku positif di lingkungan sekolah dimulai saat MOPDB, pembiasaan-pembiasaan berkomunikasi dan berinteraksi sampai kelulusan. Oleh karena itu, sekolah membutuhkan kerja sama yang baik antara pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pengelola sekolah, yaitu dalam hal ini kerja sama dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi penumbuhan budi pekerti dengan membuat program-program sekolah

berwujud kegiatan-kegiatan dengan tujuan menumbuhkan sikap dan perilaku positif warga sekolah.

SMP Negeri 3 Semarang merupakan salah satu satuan pendidikan formal menengah pertama di Semarang. SMP Negeri 3 Semarang mengalami perubahan atau perbaikan bangunan sekolah mulai tahun 1970, tidak hanya bangunan fisik yang diperbaiki tetapi juga bangunan non fisik mulai tahun 1990 yang bekerjasama dengan BP-3 (Badan Pembantu Sekolah). SMP Negeri 3 Semarang memiliki visi “berbudi luhur, berpengetahuan tinggi, dan berwawasan luas”. Aktualisasi dari visi sekolah tersebut adalah dengan adanya beberapa program sekolah khususnya yang berhubungan dengan pengembangan karakter siswa, yaitu: program pendidikan karakter dan ada beberapa kegiatan *best practice nationalism*. SMP Negeri 3 Semarang memiliki 20 karakter dengan menginternalisasikannya ke dalam 30 kegiatan dari program pendidikan karakter dan 15 kegiatan *best practice nationalism*.

SMP Negeri 3 Semarang merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan penumbuhan budi pekerti sesuai dengan himbauan pemerintah yang mewajibkan penumbuhan budi pekerti dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia mulai tahun pelajaran 2015/2016. Berikut di bawah ini bagan 2.2 tentang kerangka berpikir pelaksanaan penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 3 Semarang oleh pendidik dan tenaga kependidikan.





Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang terdapat pada program pendidikan karakter. Pembiasaan bersikap dan berperilaku positif warga SMP Negeri 3 Semarang merupakan budaya sekolah yang diperkenalkan kepada siswa ketika MOPDB. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa MOPDB diisi dengan kegiatan pengenalan budaya SMP Negeri 3 Semarang oleh pendidik dan tenaga kependidikan dan mulai melatih siswa untuk terbiasa dengan budaya itu.
2. Pelaksanaan penumbuhan budi pekerti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Semarang terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan dari program pendidikan karakter. Dua puluh karakter yang harus dimiliki warga sekolah diinternalisasikan ke dalam 30 (tiga puluh) kegiatan dari program pendidikan karakter. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa internalisasi 20 (dua puluh) karakter SMP Negeri 3 Semarang ke dalam 30 (tiga puluh) kegiatan dari program pendidikan karakter sudah sesuai dengan tujuh aspek kegiatan penumbuhan budi pekerti yang terdapat pada lampiran Permendikbud

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti baik yang terdiri dari kegiatan wajib, pembiasaan umum, dan periodik. Terdapat kegiatan unggulan (*best practice nationalism*) pembiasaan sikap dan perilaku positif warga SMP Negeri 3 Semarang, yaitu sholat berjamaah, tadarus, dan membaca Asmaul Husna.

3. Evaluasi dari kegiatan penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 3 Semarang tidak hanya dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sekolah saja, tetapi juga melibatkan pihak luar yang terkait. Pelibatan pihak luar yang terkait baik dalam bentuk memantau dan mengevaluasi yang dilanjutkan dengan memberikan arahan dapat membantu sekolah dalam mengevaluasi hasil keterlaksanaan program sekolah yang selama ini sudah dilaksanakan.

## B. Saran

Saran ditujukan kepada:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan
  - a. Pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Semarang untuk tidak hanya melaksanakan salah satu kegiatan dari penumbuhan budi pekerti yaitu menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi di lingkungan SMP Negeri 3 Semarang pada hari Kamis oleh guru dan staff sekolah saja, tetapi oleh siswa dan siswi juga sesuai dengan peserta yang dtunjukan.

- b. Harus adanya pola untuk memandu pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengevaluasi penumbuhan budi pekerti.
2. SMP Negeri 3 Semarang untuk menyediakan tempat beribadah bagi siswa yang beragama selain Islam, Kristen, dan Katholik, karena ada beberapa siswa yang beragama Budha dan melaksanakan kegiatan maupun pembelajaran agama di perpustakaan.
3. Pemerintah
  - a. Harus adanya panduan dalam memantau dan mengevaluasi penumbuhan budi pekerti bagi pemerintah.
  - b. Pemerintah untuk melaksanakan wewenang dan kewajibannya memantau dan mengevaluasi penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 3 Semarang secara rutin yaitu awal masuk sekolah, kegiatan keseharain, dan ketika acara kelulusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berbudaya Saing Tinggi*. Jakarta: Intima.
- Arifin, Ardiansyah. 2010. *Pelaksanaan*. <http://www.ekhardi.blogspot.co.id> (diunduh tanggal: 11 Februari 2016).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional. 2014. *Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014. Laporan Survey*. Jakarta: Puslitkes.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Budi Pekerti Jawa, Tuntutan Luhur dari Budaya Adiluhung*. Jogjakarta: Buana Pustaka Perum Pertamina.
- Gunawan, Heri. 2014. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ivonna Indah, dkk. 2003. *Pendidikan Budi Pekerti untuk SD*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Lexy J., Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J., Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mendikbud. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

- Mendikbud. 2015. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mendiknas. 2007. *Permendikbud Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- Mendiknas. 2007. *Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi.
- Mendiknas. 2009. *Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- Mendiknas. 2010. *Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- Muslich, Masnur. 2013. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Paul Suparno, dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Paul Suparno, dkk. 2004. *Pendidikan Budi Pekerti Untuk SMP*. Yogyakarta: Kanisius.
- Presiden Republik Indonesia. 1990. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sekolah Dasar*. Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Qodar, Nafiysul. 2015. *Survey ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah*. <http://www.mliputan6.com>. (diunduh: 5 Mei 2016).

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarna. 2007. Strategi Integrasi Pendidikan Budi Pekerti dalam Pembelajaran Berbasis Kompetensi. *Jurnal. Th. XXVI. No.1*. Yogyakarta: Cakrawala Pendidikan.
- Zuriah, Nurul. 2011. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.





Gambar. Petugas Kebersihan  
Sumber: Dokumentasi

Gambar. Satpam/ Petugas  
Keamanan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

